Express News

Kehadiran dan Perjalanan Dinas Dewan Diperketat

PONTIANAK, SP – Jumlah kehadiran anggota dewan akan dipertegas. Hal tersebut telah diatur dalam tata tertib (Tatib) DPRD Kalbar periode 2014-2019. Penegasan kehadiran para wakil rakyat ini berdasarkan pengalaman pada periode sebelumnya, di mana para wakil rakyat tersebut kerap mangkir saat kegiatan kedewanan di gedung parlemen.

• Baca Halaman 15

Suryansyah
Wakil Ketua DPRD Kalbar

Hal 9 ■ **kehadiran dan**

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suryansyah menjelaskan, Tatib memang tidak diatur pemberian sanksi melainkan hanya dalam bentuk teguran. Contohnya, apabila ada anggota dewan yang mangkir dalam rapat panitia khusus (Pansus), akan diberi peringatan oleh Ketua Pansus melalui masing-masing fraksi.

"Tujuannya supaya anggota dewan bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik," kata Suriyansah kepada wartawan, kemarin.

Politisi Partai Gerindra ini menyebut persoalan kehadiran dilakukan secara keseluruhan termasuk dalam rapat paripurna.

"Termasuk dalam paripurna, rapat-rapat pansus dan rapat komisi. Kami sebenarnya ada kode etik yang harus dipatuhi, jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa anggota dewan tidak disiplin," jelasnya.

Soal kunjungan kerja atau perjalanan dinas juga dibahas dalam Tatib. Pasalnya pada periode lalu terdapat beberapa catatan tentang perjalanan dinas mengenai mana yang boleh dan tidak boleh sesuai instruksi Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP).

"Kami sebenarnya mempertegas saja, misalnya perjalanan dewan mana yang boleh dibiayai APBD, mana yang tidak. terutama sesuai dengan temuan BPK. Sebelumnya ada perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya," jelas Suriyansah.

Suriansyah menyatakan berbagai hal yang dibahas dan ditetapkan dalam Tatib sebenarnya bukan untuk memberatkan anggota dewan. Namun sebaliknya agar setiap anggota dewan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, minimal terhadap konstituen di daerah pemilihan.

"Yang tidak prioritas dibiayai APBD seperti kunjungan peresmian rumah ibadah, acara haul yang tidak ada kaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPRD dikendalikan dan diatur dalam tatib," tutupnya. **(iee)**